

Peranan Baznas dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 3T di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau

Baktiar Nasution¹, Herlina², Abdullah³, Trimono⁴, Lailan Rafiqah⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

e-mail: baktiar@diniyah.ac.id

Abstrak

Kesmiskinan merupakan persoalan krusial yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek yang terpenting dalam menanggulangi kemiskinan dengan adanya data Untuk melakukan pengukuran tingkat kemiskinan disetiap kabupaten kota diseluruh Indonesia. Berdasarkan data dari badan pusat statistik provinsi Riau kabupaten Kepulauan Meranti berada pada kategori tinggi untuk tingkat kemiskinan pada angka 25.68%. Tujuan penelitian ini adalah untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 3 T Di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau melalui program baznas. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif dengan jenis studi kasus untuk menjabarkan secara rinci sesuai keadaan dilapangan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat mengarah pada perubahan sosial ekonomi sehingga masyarakat mampu dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan dalam menjalani kehidupan untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan mengembangkan cara untuk menjangkau sumber daya yang diperlukan.

Kata kunci: *Peranan, Baznas, Ekonomi Masyarakat.*

Abstract

Poverty is a crucial issue that is the center of government attention. One of the most important aspects in overcoming poverty is data to measure the level of poverty in every city district throughout Indonesia. Based on data from the Riau Province Central Statistics Agency, Meranti Islands Regency is in the high category for poverty level at 25.68%. The aim of this research is to improve the economy of the 3 T community in Meranti Islands Regency, Riau Province through the Baznas program. Researchers use a descriptive qualitative approach with a case study type to describe in detail according to the conditions in the field. Community empowerment leads to socio-economic change so that people are able and have the knowledge and skills to live their lives to increase their income, solve the problems they face, and develop ways to reach the necessary resources.

Keywords : *Role, Baznas, Community Economy.*

PENDAHULUAN

Kesmiskinan merupakan persoalan krusial yang menjadi pusat perhatian pemerintah diseluruh negara manapun. Salah satu aspek yang terpenting dalam menanggulangi kemiskinan adanya data yang dapat dipercaya untuk mengambil kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Untuk menentukan tingkat kemiskinan disetiap kabupaten kota yang ada di Indonesia memiliki badan pusat statistik nasional yang memiliki konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dalam melakukan pengukuran, dengan cara ini kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Berdasarkan data dari badan pusat statistik provinsi Riau kabupaten Kepulauan Meranti berada pada kategori tinggi untuk tingkat kemiskinan pada angka 25.68%. jika

dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di provinsi Riau yang hanya berkisar kurang lebih berkisar 10%. Maknanya masyarakat kabupaten kepulauan meranti membutuhkan bantuan baik secara langsung maupun secara terprogram melalui lembaga-lembaga keuangan yang ada diprovinsi riau khususnya atau indonesia umumnya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan dengan menyalurkan bantuan berupa zakat dari masyarakat atau dari yang lainnya.

Di Indonesia memiliki sebuah lembaga yang mengelola zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional yang tersebar diseluruh provinsi dan kabupaten kota yang ada di indonesia. Sesuai dengan-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) Unit pengumpulan Zakat (UPZ). Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Adapun yang menjadi Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Pasal 3 adalah agar mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta mampu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Baznas provinsi riau memiliki lima program unggulan yakni Riau sehat, Riau Dakwah, Riau Cerdas, Riau makmur dan Riau peduli. Pada program riau sehat salah satu bentuk perwujudannya yakni adanya rumah singgah yang didirikan oleh Baznas Provinsi beralamatkan di jalan Hang Tuah diperuntukkan bagi kaum muslim dhuafa yang berasal dari provinsi Riau rumah singgah ini juga bekerjasama dengan RSUD Arifin Ahmad. Riau Dakwah memiliki program dengan mengutus para ustad/ustadzah untuk berdakwah ke pelosok riau untuk menyiarkan agama islam, Riau Cerdas yakni memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada para mahasiswa/i yang ada diseluruh kampus di provinsi Riau, program Riau makmur yakni memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik untuk pengembangan usaha, dan program riau peduli yakni pemberoan bantuan kepada daerah-daerah yang terkena musibah seperti banjir, tanah longsor dan yang lainnya.

Pada Desember 2021 kemarin Baznas Provinsi Riau melalui program Riau Makmur memberikan bantuan kepada Baznas Kabupaten kepulauan meranti sebesar 300 juta untuk mustahik yang ada di kepulauan meranti yang nantinya bantuan tersebut akan diberikan kepada para mustahik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada disana. Adapun program baznas yang sudah berjalan di kabupaten kepulauan meranti yakni melalui Riau Peduli melaksanakan bedah rumah tepatnya di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi, selain dari program Riau Cerdas adanya beasiswa pendidikan yang diberikan kepada para mustahik yang ada di kepulauan meranti.

Berdasarkan data dan fakta yang telah disajikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Peranan Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 3 T Di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau”**.

METODE

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Deskriptif dengan jenis studi kasus. Pemilihan jenis studi kasus pada penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengungkap secara menyeluruh dan mendalam terkait “Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 3T di Kabupaten Kepulauan Meranti”. Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam menggali data Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 3T melibatkan berbagai aspek yang perlu untuk digali secara menyeluruh dan mendalam. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan mengungkap fakta dan keadaan yang terjadi dengan menyajikan data apa adanya. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek, yang di sebut sebagai kasus, yang dilakukan secara seutuhnya, menyeluruh, dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber data”.

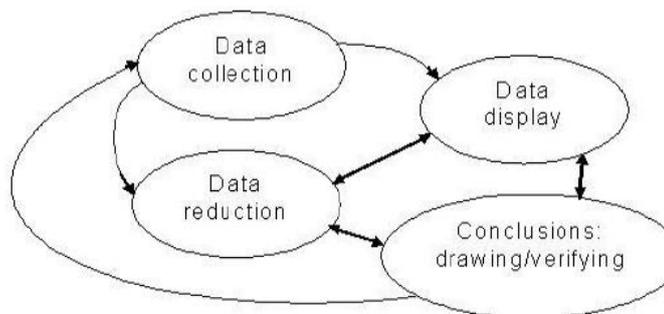
Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala dan Anggota BAZNAS Provinsi dan Kota/Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai *Key Informan*.
2. Masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan ekonomi oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai *Informan*. Dipilih sebagai *Informan* karena terkait langsung dengan subjek dan objek penelitian.
3. Stakeholder Pejabat pemerintahan dilingkungan Kab Kep Meranti sebagai *Informan*. Dipilih sebagai *Informan* karena terakit langsung dengan sobjek dan objek penelitian.

Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini yaitu mengacu kepada model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1994: 12). Tahapan analisis data yang dimaksud terdiri dari tiga tahapan. Ketiga tahapan itu disajikan seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 1 Komponen Analisis Data: Model Interaktif Miles and Huberman

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. Data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Pada penelitian ini, penyajian data dituangkan secara naratif. Tahapan penyajian data ini dilakukan dengan tujuan agar pembaca dapat memahami apa yang terjadi dengan mudah. Dalam klasifikasi analisis ini, data disusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dalam penarikan kesimpulan.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah keempat dalam analisis data menurut miles & huberman adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahapan ini tidak meninggalkan dua tahapan sebelumnya yaitu reduksi dan penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan dua tahapan sebelumnya. Kesimpulan yang diperoleh harus selalu diverifikasi selama proses penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Baznas

Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan perannya. Peran dalam ilmu sosial diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang diduduki.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau kelompok yang memberikan pengaruh kepada kelompok atau masyarakat secara luas. Jika dihubungkan dengan ekonomi dapat diartikan bahwa peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha dan kegiatan yang dijalankan sebagai gerakan ekonomi rakyat serta badan usaha.

Menurut Biddle dan Thomas membagi istilah peran kedalam empat golongan yaitu:

1. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut: pertama Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu. Kedua Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya, Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan person, ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter ego, atau non-self.

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut : Pertama Harapan tentang peran (*expectation*) Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu. Kedua norma Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Ketiga Wujud perilaku dalam peran (*performance*) Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor.

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.

4. Kaitan antara orang dan perilaku

Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan.

Badan Amil Zakat Nasional

Terbitnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai langkah maju dalam pengelolaan potensi zakat yang begitu besar di Indonesia. tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan zakat. Selain itu, tujuan dibentuknya lembaga BAZNAS adalah untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Undang-undang tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah atas nilai filantropi Islam yang bergerak dibidang zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi satu-satunya yang dibentuk pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan mengelola zakat, infak, dan sedekah ditingkat nasional. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memberikan tugas khusus kepada BAZNAS sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab atas pengelolaan zakat dalam skala nasional. Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Kementerian Agama RI.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk pemerintah melalui Kementerian Agama. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga terdapat pada tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur. Pembentukan ini dapat terwujud setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditingkat provinsi bertanggungjawab kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat dan pemerintah daerah provinsi. Adapun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditingkat kota/kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas rekomendasi walikota/bupati melalui pertimbangan dan persetujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat kota/kabupaten memiliki tanggung jawab kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi serta pemerintah daerah kota/kabupaten.

Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah; (a) mewujudkan lembaga pengelola zakat yang kuat, kredibel, dan modern; (b) mengoptimalkan pengumpulan zakat dalam skala nasional; (c) mewujudkan distribusi zakat, infak, dan sedekah yang efektif dan efisien dalam menanggulangi kemiskinan, mewujudkan kesejahteraan sosial, serta mengurangi kesenjangan sosial; (d) mewujudkan profesi pengelola zakat (Amil) yang berkompeten dan berintegritas; (e) mewujudkan sistem manajemen tata kelola zakat yang mutakhir sesuai dengan teknologi modern; (f) mengoptimalkan perencanaan, laporan, dan pertanggungjawaban tata kelola zakat yang baik; (g) mewujudkan sikap saling menolong antara *muzakki* dan *mustahiq*; (h) mensinergikan antar pengelola zakat untuk kepentingan zakat nasional; (i) mewujudkan negara Indonesia sebagai negara yang *center of excellence* dalam tata kelola zakat dunia.

Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berada dalam seluruh wilayah Indonesia meskipun di daerah terpencil dengan dibantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat kota/kabupaten. Penyaluran zakat diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu; (a) santunan yang bersifat konsumtif; (b) dalam bentuk pemberdayaan (produktif). Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bersifat konsumtif terdiri dari dua program yaitu; (a) pelayanan untuk *mustahiq* (b) Tanggap Darurat Bencana. Sedangkan program-program BAZNAS yang bersifat produktif:

1. *Zakat Community Development* (ZCD), sebuah program BAZNAS yang memiliki misi mengembangkan komunitas masyarakat melalui integrasi struktur sosial-ekonomi secara komperhensif guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Adapun sumber dana program ini adalah zakat, infak, sedekah.
2. Rumah Makmur BAZNAS, program ini merupakan program yang bergerak di bidang ekonomi dengan memberi modal kerja melalui sistem pembinaan dan pendampingan. Program ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang berdomisili di wilayah perkotaan karena memiliki misi meningkatkan kapasitas modal kerja serta pendampingan.

3. Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB), ialah program pendanaan dan bimbingan siswa dalam sektor pendidikan dan pelatihan. Program ini memberi bimbingan pendidikan kepada siswa dan mahasiswa untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik.
4. Rumah Sehat BAZNAS, program yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan secara komprehensif. Program ini diperuntukkan masyarakat miskin secara gratis melalui sistem member.
5. Rumah Dakwah *Muallaf*, salah satu program BAZNAS yang mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam (*muallaf*), melatih kaderisasi masyarakat untuk menjadi ulama, pelopor pembangunan masyarakat, serta menyebarkan dakwah Islam di daerah-daerah terpencil.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “power” yaitu kekuasaan atau keberdayaan yang menunjukkan pada sebuah kemampuan seseorang atau kelompok. Khususnya pada kelompok lemah atau rentan sehingga mereka mempunyai kemampuan dalam : (a) memenuhi kebutuhan dasar (bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan), (b) meraih sumber daya yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, (c) ikut berpartisipasi pada proses pembangunan dan bersama-sama membuat keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai sebuah proses penyadaran terhadap komunitas masyarakat yang dilakukan secara transformasi, partisipasi dan berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan dalam menghadapi persoalan dan peningkatan keadaan taraf kehidupannya. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebuah proses pemberdayaan yaitu serangkaian kegiatan dalam memperkuat keberdayaan komunitas masyarakat lemah. Sedangkan tujuan yaitu perubahan sosial yang ingin diubah melalui pemberdayaan.

Ekonomi Masyarakat

Ekonomi rakyat adalah cara “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh masyarakat miskin, baik masyarakat di kota ataupun desa. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ekonomi masyarakat dapat diartikan sebagai cara dalam mengelola rumah tangga. Tujuan akhirnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui 3 kegiatan utama yaitu: produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan segala kegiatan dalam bidang ekonomi dan upaya yang dilakukan masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan dasar. Adapun pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bidang pendidikan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seluruh masyarakat dan anggota keluarganya sebagai bentuk hak dalam partisipasi pada pendidikan. Maka dari itu, pemberdayaan ekonomi pada masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengelola sumber daya apapun yang dapat dikuasai oleh komunitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.

Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Upaya pemberdayaan memerlukan dukungan dari banyak pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Pemberdayaan memiliki dampak terhadap kemandirian masyarakat untuk keluar dari hambatan ekonomi, sehingga masyarakat yang berdaya akan dapat mengaktualisasikan potensi dan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan dari luar sebagai resiko dari sebuah pembangunan. Harapannya adalah proses pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu:

1. Menganalisa potensi yang ada dilingkungannya.
2. Meningkatkan taraf hidup anggota keluarganya
3. memecahkan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan mereka.
4. Meningkatkan penghasilan dan perbaikan taraf hidup masyarakat.
5. Mengembangkan cara untuk menjangkau sumber daya yang diperlukan.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat tersebut mengarah pada keadaan atau hasil akhir yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial, yaitu meningkatkan daya saing

masyarakat yang tidak berdaya serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat ekonomi, ataupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan pendapat memiliki mata pencaharian, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya ditengah komunitas masyarakat. Kesimpulannya, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah agar masyarakat mampu dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan dalam menjalani kehidupan untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan mengembangkan cara untuk menjangkau sumber daya yang diperlukan.

SIMPULAN

Upaya untuk meningkatkan perekonomian memerlukan dukungan dari banyak pihak, baik pemerintah maupun instansi lembaga swadaya masyarakat. Hal ini akan berdampak terhadap kemandirian masyarakat untuk keluar dari hambatan ekonomi, sehingga masyarakat yang berdaya akan dapat mengaktualisasikan potensi dan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan dari luar. Adapun dampak lain yakni agar masyarakat mampu dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan dalam menjalani kehidupan untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan mengembangkan cara untuk menjangkau sumber daya yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Muslim. 2009. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Teras
- BAZNAS. 2021. *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. <https://baznas.go.id/>
- Bimo Walgito, 2003. *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Edisi Revisi, Andi Offset
- Biddle dan Thomas, 2015. dalam Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers
- Coryna, I. A., & Tanjung, H. 2015. *Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. *Al-Muzara'ah*, 3(2),
- Edi Sugarto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Bandung : PT Ravika Adimatama
- Gunawan Sumodiningrat. (1998) *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- <https://riau.bps.go.id/indicator/23/43/1/persentase-penduduk-miskin-kab-kot-.html>
- <https://baznas.riau.go.id/ketua-baznas-riau-distribusikan-rp-300-juta-dana-zakat-untuk-mustahik-di-kabupaten-meranti>
- <https://www.facebook.com/search/top?q=baznas%20meranti>
- Imam Gunawan. 2014. *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mubyarto. 1996 *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*. Yogyakarta: Adhya Media
- Mardiyah, S. 2018 *Manajemen Strategi Baznas Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam. I- Finance: A Research Journal On Islamic Finance*, 4
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B. & Huberman. A.M. 1994. *Qualitative data analysis*. New York: SAGE Publications
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka